



**WALIKOTA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 49 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022**

**2017-2022**

**RENSTRA**



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian sasaran, indikator sasaran, program, indikator program dan perubahan target capaian pada Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 52) diubah sebagai berikut: Mengubah Lampiran terkait sasaran, indikator sasaran, program, indikator program dan target sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Juni 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA  
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 49

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 49 TAHUN 2021**  
**TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR**  
**105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2017-2022**

**TARGET SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Indikator Tujuan PD	Target Tujuan PD		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran PD	Realisasi Sasaran PD				Target Sasaran PD		Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Realisasi Program PD				Target Program PD							
				Awal	Akhir				2017	2018	2019	2020	2021	2022				2017	2018	2019	2020	2021	2022						
1	Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Hasil Nilai Evaluasi Kemendagri	Tinggi (skala 2-3)	-	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Hasil Nilai Evaluasi Kemendagri	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (3,4581)	-	-	Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan	Perentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	Jumlah urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi / jumlah urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan x 100%	81,25%	73,34%	90%	90,00%	-	-						
				Nilai Pendapat Asli Daerah (PAD)	Rp545 milyar				7,74%	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Pendapatan Asli Daerah	nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian	22,50%	1,85%		-	-	-	-	-	Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	Perentase harmonisasi produk hukum daerah	Produk hukum yang diharmonisasi / produk hukum yang ditetapkan x 100%	100%	100%	128,63%	100%	-	-
																						Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66	94,67
Indeks Pelayanan Publik	Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal	79,75	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal	79,77	80,21	80,45	80,45	-	-	-	Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	Perentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	Jumlah paket pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu / jumlah paket pengadaan yang dilelangkan x 100%	96,24%	139,21%	80,39%	90,20%	-	-								
														Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66	94,67	94,82	89,44	-	-	-	Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumah tanggaaan	Indeks Kepuasan Layanan	hasil survey responden
Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66	94,67	94,82	89,44	-	-	-	Program pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah															Indeks Kepuasan Layanan Keptrotokolan	hasil survey responden

**TARGET SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021-2022**

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Indikator Tujuan PD	Target Tujuan PD		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran PD	Realisasi Sasaran PD				Target Sasaran PD		Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Realisasi Program PD				Target Program PD	
				Awal	Akhir				2017	2018	2019	2020	2021	2022				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	Hasil skorng deklaras keberdayaan kampung	26,15	40,59	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayan Masyarakat Berbasis Kampung	Hasil skorng deklaras keberdayaan kampung	28,81	38,98	39,82	40,59	40,59	40,59	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Perentase peningkatan Swadaya Masyarakat	(jumlah swadaya murni masyarakat tahun berjalan-jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya)/jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya*100%	1,01%	1,04%	3,23%	2,15%	1,16%	1,14%
				Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan				86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66	94,67		94,82	89,44	94,30	95,40	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Perentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	(jumlah kelembagaan yang aktif/jumlah lembaga masyarakat yang ada)* 100%	-
Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat			Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66							94,67						94,82	89,44	94,30
				Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan				86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66	94,67		94,82	89,44	94,30	95,40	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat			Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66							94,67						94,82	89,44	94,30
				Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan				86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66	94,67		94,82	89,44	94,30	95,40	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat			Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66							94,67						94,82	89,44	94,30
				Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan				86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66	94,67		94,82	89,44	94,30	95,40	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat			Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66							94,67						94,82	89,44	94,30
				Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan				86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66	94,67		94,82	89,44	94,30	95,40	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat			Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66							94,67						94,82	89,44	94,30
				Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan				86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66	94,67		94,82	89,44	94,30	95,40	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat			Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66							94,67						94,82	89,44	94,30
				Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan				86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66	94,67		94,82	89,44	94,30	95,40	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat			Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66							94,67						94,82	89,44	94,30
				Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan				86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66	94,67		94,82	89,44	94,30	95,40	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat			Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66							94,67						94,82	89,44	94,30
				Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan				86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66	94,67		94,82	89,44	94,30	95,40	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat			Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66							94,67						94,82	89,44	94,30
				Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan				86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66	94,67		94,82	89,44	94,30	95,40	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat			Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66							94,67						94,82	89,44	94,30
				Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan				86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66	94,67		94,82	89,44	94,30	95,40	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat			Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66							94,67						94,82	89,44	94,30
				Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan				86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66	94,67		94,82	89,44	94,30	95,40	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat			Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66							94,67						94,82	89,44	94,30
				Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan				86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66	94,67		94,82	89,44	94,30	95,40	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat			Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66							94,67						94,82	89,44	94,30
				Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan				86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66	94,67		94,82	89,44	94,30	95,40	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan	86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat			Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66							94,67						94,82	89,44	94,30
				Indeks Pelaksanaan Pembangunan	70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan				86,1	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	90,66	94,67		94,82	89,44	94,30	95,40	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN			